



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Mr.Dr. Kusumaatmaja No.8 Telp. (0264) 200640  
Purwakarta



## KATA PENGANTAR

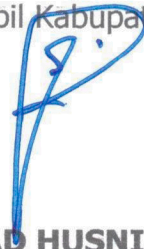
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas, agar lebih terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan visi misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018- 2023.

Purwakarta, 16 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



**MUHAMAD HUSNI, SH., MH.**

NIP. 19670424 198703 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman

**Judul**

**Halaman**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang ..... 1
- 1.2. Landasan Hukum ..... 3
- 1.3. Maksud dan Tujuan ..... 8
- 1.4. Sistematika Penulisan ..... 9

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 11
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 17
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 18
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 20
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 26

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 28
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 29
- 3.3. Program dan Kegiatan ..... 30

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan sinergitas dan pencapaian prioritas pembangunan telah dirumuskan pula tujuan bersama (*common goals*), yaitu "**Salapan Langkah Ngawangun Nagri Raharja dan Tujuh belas Prinsip Kahuripan Purwakarta**", yang telah menjadi komitmen semua pihak dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPJMD) 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023.

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja) ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator Program yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

### **1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.



Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (Dua) Sub bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang dan 26 Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
4. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan.

### **1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat

- (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 237 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPJMD ) 2018-2023; dan
21. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2023;
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (Satu) Urusan Yaitu Urusan wajib bukan pelayanan dasar Sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan 4 Program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 17.028.289.723,- (Tujuh Belas Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan;
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika;
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi kependudukan; dan

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan /masih banyak menggunakan jasa perantara /calo;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

TABEL T-C29

**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA 2021**

No.	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator (Sesuai DPA)	Fisik		Anggaran		Analisis
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				17.028.289.783	15.899.342.590	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.344.228.373	15.339.710.420	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.642.079	59.080.892	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	26.072.617	24.288.617	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	44.569.462	34.792.275	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>11.313.099.005</b>	<b>10.833.477.794</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan tunjangan	106 Orang	106 Orang	11.300.780.707	10.822.626.556	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.318.298	10.851.238	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>52.772.924</b>	<b>52.771.350</b>	



	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah media sosialisasi kebijakan administrasi yang dilaksanakan	3 item	3 item	52.772.924	52.771.350
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>3.355.347.315</b>	<b>3.155.246.785</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan bangunan kantor	15 Jenis		46.973.670	38.142.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 item		2.608.495.459	2.583.298.810
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	40 item	40 item	28.680.562	28.410.905
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang dibutuhkan	36 item		432.090.778	332.080.194
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	9 Jenis		71.470.796	65.018.354
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	37 Kegiatan		167.636.050	108.296.122
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>150.425.000</b>	<b>148.854.628</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	150.425.000	148.854.628
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.188.382.050</b>	<b>991.278.971</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan Jasa Surat menyurat yang dibutuhkan	900 materai	900 materai	184.635.650	181.862.071
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayarkan / bulan	9 Rekening	9 Rekening	698.478.400	516.329.021

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kantor	Petugas Kebersihan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	305.268.000	293.087.879
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>213.560.000</b>	<b>99.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas operasional	pemeliharaan kendaraan dinas	11 unit		22.860.000	14.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perijinan Unit Kendaraan roda 2	pemeliharaan dan perijinan Unit Kendaraan roda	36 unit		160.000.000	75.000.000
	Jumlah perijinan Unit Kendaraan roda 4	pemeliharaan dan perijinan Unit Kendaraan roda	12 unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung secara Berkala	Pemeliharaan Gedung secara	15 unit		30.700.000	9.600.000
	Jumlah rutin/berkala pertengkapan gedung	pemeliharaan pertengkapan gedung	20 unit			
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>					<b>48.023.061</b>	<b>36.350.061</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					<b>48.023.061</b>	<b>36.350.061</b>
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Keillingan (jemput Bola)	lokasi Kegiatan Kependudukan Keillingan (jemput Bola)	17 Kecamatan		48.023.061	36.350.061
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>					<b>47.160.061</b>	<b>36.168.520</b>
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					<b>47.160.061</b>	<b>36.168.520</b>
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Keillingan (jemput Bola)	lokasi Kegiatan Pencatatan Sipil Keillingan (jemput Bola)	17 Kecamatan		47.160.061	36.168.520

<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>588.878.288</b>	<b>487.113.589</b>	
<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>						<b>249.985.295</b>	<b>221.172.703</b>	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Kependudukan	Dokumen	1 Dokumen			49.988.982	22.011.606	
	Jumlah Peserta Pembinaan		50 orang					
			3 Perangkat					
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan data oleh lembaga pengguna dan jumlah perangkat keras/lunak penunjang pemanfaatan data kependudukan		5 Instansi			199.996.313	199.161.097	
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>298.893.463</b>	<b>253.643.356</b>	
Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan SIAK	Pemeliharaan dan Peralatan	5 item			99.998.265	78.574.060	
	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan SIAK	Pengadaan dan Peralatan	14 item					
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pengembangan Inovasi pelayanan pemanfaatan data kependudukan		3 Jenis			198.895.198	175.069.296	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>39.999.530</b>	<b>12.297.530</b>	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekwensi kecamatan	Pembinaan ke	17 Kecamatan			39.999.530	12.297.530	



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kerangka analisis kinerja pelayanan terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui, yaitu data internal dan eksternal. Sedangkan penetapan indikator kerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

**Tabel T-C 30**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Purwakarta**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi PD	Satuan	Target	Realisasi
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran		80	

2.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:			
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik		90	
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga		90	
	- Tingkat Kepemilikan KIA		90	
	Tingkat Kesadaran Masyarakat		90	
3.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil :			
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran		90	
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kematian		90	
	- Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan		90	
	- Tingkat kepemilikan Akta Perceraian		90	
4.	Tingkat Akurasi data Kependudukan		90	
	Persentase Pengelolaan informasi kependudukan		90	
	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan		90	
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan		90	
	Persentase Pemanfaatan data oleh Instansi/Lembaga Pengguna		90	
	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk		90	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu – isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun isu – isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih ada permasalahan permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti : KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil.
  2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.
  3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan dan masih banyak menggunakan jasa perantara.
- Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah

(solusi):



1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan.
2. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yg ada, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dapat dipergunakan sementara waktu sampai dengan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.

**2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN	
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	5	6	7 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	9	10	11	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20,242,525,450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20,242,525,450	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,565,525,450	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,565,525,450	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	33,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	33,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	33,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,016,500,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,016,500,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			116 Orang/bulan	12,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	12,000,000,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16,500,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>180,000,000</b>				<b>180,000,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	180,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	180,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>3,177,000,000</b>				<b>3,177,000,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Item	71,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Item	71,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,340,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,340,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	33,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	33,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	25 item	400,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	25 item	400,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	82,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	82,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kegiatan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kegiatan	250,000,000
		2 paket				2 paket	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>293,525,450</b>				<b>293,525,450</b>



	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	293,525,450	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	293,525,450
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,355,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,355,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Material	100 lembar	130,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Material	100 lembar	130,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	825,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	825,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum kantor	7 Orang	400,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum kantor	7 Orang	400,000,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>477,500,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>477,500,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	27,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	27,500,000
7 Unit			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	3 Unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Periznannya	3 Unit	150,000,000
100 Unit			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	250,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250,000,000

	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>652,000,000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						<b>652,000,000</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>100,000,000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>100,000,000</b>
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Jemput bola	25 kegiatan		100,000,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Jumlah Kegiatan Jemput bola	25 kegiatan	100,000,000
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>552,000,000</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>552,000,000</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen		552,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	552,000,000
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>100,000,000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>						<b>100,000,000</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>100,000,000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>						<b>100,000,000</b>
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput Bola)	17 Kali		100,000,000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				Frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput Bola)	17 Kali	100,000,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>1,925,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>1,925,000,000</b>
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				<b>350,000,000</b>	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						<b>350,000,000</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen		150,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen	150,000,000
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Dokumen		200,000,000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Dokumen	200,000,000
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,275,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>1,275,000,000</b>



	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	1,000,000,000	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	1,000,000,000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Lembaga/instansi	200,000,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Lembaga/instansi	200,000,000
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 paket	75,000,000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 paket	75,000,000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>300,000,000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>300,000,000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan	50,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan	50,000,000
	Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 paket	250,000,000	Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 paket	250,000,000



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui dua macam perencanaan yaitu Bottom Up dan Top Down. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD. Pada Tahun 2023 terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG dan telah ditelaah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C 32**  
**USULAN LANGSUNG (ASPIRASI) DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Usulan	Lokasi	Indikator	Besaran / Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
TIDAK ADA USULAN LANGSUNG/ASPIRASI						

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2020-2024, dimana program prioritas presiden 2020-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi Output/sasaran strategis kemendagri dari program tersebut :
  - a. Pembangunan SDM
  - b. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana
  - c. Penyederhanaan regulasi
  - d. Reformasi Birokrasi
  - e. Transformasi ekonomi
  - f. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri
  - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa



- h. Pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
- i. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah
- j. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan output/sasaran strategis kemendagri tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada sasaran point h yaitu pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik. Penyeragaman program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil :

- 1) Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- 2) Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
- 3) Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
- 4) Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 telah

ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- Tujuan :
1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal
  2. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Kependudukan
  3. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Pencatatan Sipil
  4. Terwujudnya akurasi penyajian data dan pemanfaatan data kependudukan

- Sasaran :
1. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah
  2. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan
  3. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
  4. Meningkatnya akurasi penyajian data dan pemanfaatan data kependudukan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Permasalahan pelaksanaan program pada Tahun 2023 antara lain:

1. Perubahan prioritas pembangunan PMDN 90 Tahun 2019.
2. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait PMDN 90 Tahun 2019.
3. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian program/ kegiatan.

Kode					Perangkat Daerah/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1					2
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>12</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2	12	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
2	12	2	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	2	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
2	12	3			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
2	12	3	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
2	12	4	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	4	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	4	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>

2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :



Tabel T-C 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	2.01									
2	12	1								
2	12	1	2.01							
2	12	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan	33,000,000	37,950,000
2	12	1	1		1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33,000,000	37,950,000
2	12	1	1		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini		37,950,000
2	12	1	1		1	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %		37,950,000
2	12	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan	33,000,000	37,950,000

2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,016,500,000															
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			116 Orang /bulan		12,000,000,000										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini		0		
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		16,500,000											Perentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %		18,000,000	
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180,000,000															180,000,000
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			135 Paket		180,000,000										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini			180,000,000	
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,177,000,000															864,750,000
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			18 item		71,500,000										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini			100,000,000	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket		2,340,000,000										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini			0	





2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	825,000,000		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %	850,000,000							
										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini								
										Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %								
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum kantor	7 Orang	400,000,000		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini	450,000,000							
										Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %								
2	12	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>477,500,000</b>				<b>525,000,000</b>							
										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini								
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	27,500,000		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %	30,000,000							
										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini								
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %	165,000,000							
										Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini								
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	50,000,000		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini	55,000,000							



					Yang Dipelihara					Persentase Penemuan Perantoran Pelayanan Perkantoran	80 %	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250,000,000		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Opini	275,000,000
2	12	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			<b>652,000,000</b>		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80 %	<b>385,000,000</b>
2	12	2	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan Jemput bola	25 kegiatan	100,000,000		Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	110,000,000
										Tingkat Kepemilikan KIA	100 %	
2	12	2	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>552,000,000</b>		Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	100 %	<b>275,000,000</b>
										Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	
										Tingkat Kepemilikan KIA	100 %	275,000,000
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	552,000,000		Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	100 %	
										Tingkat Kesadaran Masyarakat	100 %	
2	12	3			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>
2	12	3	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput)	17 Kali	100,000,000		Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	100 %	110,000,000
										Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	100 %	

									Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	100 %	
									Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	100 %	
2	12	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>2,300,000,000</b>
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						<b>385,000,000</b>
									Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	100 %	
									Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	
									Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan	100 %	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen	150,000,000	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	100 %	165,000,000
									Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	100 %	
									Tingkat Akurasi Data Kependudukan	100 %	
									Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	100 %	
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Dokumen	200,000,000	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	220,000,000

									Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan Tingkat Akurasi Data Kependudukan	100 % 100 % 100 % 100 %	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>1,275,000,000</b>			Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan Tingkat Akurasi Data Kependudukan	100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1,475,000,000</b>
									Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
									Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>		<b>200,000,000</b>			Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		<b>210,000,000</b>
									0 Laporan		
									18 Lembaga/Instansi		





										<p>Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan AdmInduk Yang di Selenggarakan</p> <p>Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna</p> <p>Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan</p> <p>Tingkat Akurasi Data Kependudukan</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
										<p>Persentase Inovasi Pelayanan AdmInduk</p> <p>Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan AdmInstrasi Kependudukan</p> <p>Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan AdmInduk Yang di Selenggarakan</p> <p>Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna</p> <p>Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan</p> <p>Tingkat Akurasi Data Kependudukan</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 paket	250,000,000				275,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana tindaklanjut PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 4



program, sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Purwakarta, 16 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta 

**MUHAMAD HUSNI, SH., MH.**  
NIP. 19670424 198703 1 003